

RINGKASAN PUBLIK

PT. BALAI KAYANG MANDIRI

Jl. Angkasa No. 2M Air Hitam, Payung Sekaki. Pekanbaru

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan-Nya penyusunan Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari PT. Balai Kayang Mandiri ini dapat diselesaikan. Pembuatan ini dimaksudkan sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang mengacu pada aspek-aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial yang diselenggarakan oleh PT. Balai Kayang Mandiri. Sumber bahan penyusunan ini adalah dokumen-dokumen seperti Rencana Kerja Usaha (RKU), dokumen HCV, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen SIA dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lainnya.

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat memberikan informasi dan melahirkan inspirasi baru tentang pengelolaan hutan tanaman di PT. Balai Kayang Mandiri.

Bunga Raya, Januari 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Identitas Perusahaan	1
1.2. Visi dan Misi Perusahaan	2
1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan	3
1.3.1. Kebijakan Konversi Hutan APP	3
1.3.2. Kebijakan Kelestarian Lingkungan	4
1.3.3. Kebijakan Kelestarian Produksi	5
1.3.4. Kebijakan Kelestarian Sosial	6
1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7
1.3.6. Kebijakan Tentang Prinsip-prinsip Dasar Pekerja	7
1.3.7. Kebijakan Penggunaan Pestisida	9
1.3.8. Kebijakan Kebakaran hutan dan Lahan	10
1.3.9. Kebijakan Benturan Kepentingan	10
BAB II. KONDISI UMUM	13
2.1. Gambaran Umum PT. Balai Kayang Mandiri	13
2.2. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar	13
2.3. Tata Ruang HTI	17
2.4. Penentuan Jenis Tanaman	18
2.5. Kondisi Sosial Ekonomi	18
BAB III. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari	20
3.1. Aspek Produksi	20
3.1.1. Perencanaan	20
3.1.2. Tata Batas	20
3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan	21
3.1.4. Penetapan Silvikultur	22
3.1.5. Pengadaa Bibit	22
3.1.6. Penyiapan Lahan	23
3.1.7. Penanaman	23
3.1.8. Pemeliharaan Tanaman	23
3.1.9. Kelas Umur Tanaman	24
3.1.10. Pengukuran Riap Tanaman	25
3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	25
3.1.11.1. Hama Penyakit Tanaman	25
3.1.11.2. Kebakaran Hutan dan Lahan	26
3.1.12. Pemanenan	27
3.2. Aspek Ekologi	27
3.3. Aspek Sosial	30
BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023	31
4.1. Aspek Produksi	31
4.1.1. Monitoring dan Evaluasi CoC	31
4.2. Aspek Ekologi	32
4.3. Aspek Sosial	39
BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024	42
5.1. Aspek Produksi	42
5.2. Aspek Ekologi	43
5.3. Aspek Sosial	49
BAB VI. PENUTUP	51

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Identitas Perusahaan

Identitas perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri (PT. BKM) sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Identitas Perusahaan PT. BKM

Tahun	Uraian
2003	Terdapat akta pendirian perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri dengan No. 40 yang dibuat oleh Notaris Eddy Sumantri, SH pada tanggal 28 Januari 2003.
2003	PT. BKM mendapat SK pencadangan dari Bupati Siak Nomor 04/IUPHHK/II/2003, tanggal 3 Februari 2003 dengan luas areal kerja 21.450 Ha yang terbagi atas 3 blok yaitu Blok Kecamatan Kandis, Blok Kecamatan Minas dan Sungai Mandau, dan Blok Kecamatan Tasik Besar Serkap.
2007	PT. BKM mendapat SK Definitif dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang IUPPHK pada Hutan Tanaman dengan Nomor : SK.20/Menhut-II/2007, tanggal 05 Januari 2007 dengan skala 1 : 100.000, luas areal kerja PT. BKM berubah menjadi ± 22.250 yang terdiri dari 4 Blok yaitu Blok Minas I, Blok Minas II, Blok Rantau dan Blok Tasik Besar Serkap.
2010	Terjadi perubahan akta notaris terkait dengan akta pendirian perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 20 yang dibuat oleh Notaris Bobby Cahyana, SH, M.Kn pada tanggal 30 November 2010.
2011	Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 18 yang dibuat oleh Bobby Cahyono, SH, M.Kn pada tanggal 13 Juli 2011.
2012	Terjadi perubahan akta notaris terkait dengan akta pendirian perusahaan PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 8 yang dibuat oleh Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH pada tanggal 6 Februari 2012.
2013	SK definitif tentang Penataan Batas di PT. Balai Kayang Mandiri dengan Nomor : SK. 57/Menhut-II/2013 pada tanggal 23 Januari 2013 dengan luas areal kerja menjadi 16.514 ha yang terdiri dari 3 blok yaitu blok Minas I (3.289 ha), blok Minas II (5.381 ha), blok Tasik Besar Serkap (7.844 ha).
2017	PT. Balai Kayang Mandiri melakukan perubahan RKU periode 2017-2026 sesuai dengan PerMENLHK P.17 tentang Perubahan Tata Ruang HTI. RKU sudah disetujui

	oleh MENLHK dengan Nomor SK 6131/MENLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 pada tanggal 14 November 2017.
2018	Dilakukan penyesuaian tata ruang RKUHHK-HT PT. BKM untuk kegiatan tahun 2018-2019 dengan No. SK 5663/MenLHK-PHPL/UPH/HPL.1/9/2018 yang sudah disahkan Dirjen PHPL pada tanggal 5 September 2018.
2018	Terjadi pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. BKM atas areal hutan produksi seluas 22.250 Ha menjadi 16.514 Ha dengan No. SK 642/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2018.
2019	Terbit Keputusan Menteri LHK tentang persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri untuk jangka 10 tahun Periode 2017-2026 Atas Nama PT. Balai Kayang Mandiri di Provinsi Riau dengan SK No. 6071/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 disetujui pada tanggal 28 Juni 2019.
2021	Terdapat perubahan akta notaris terkait dengan pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 1 yang dibuat oleh Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. pada tanggal 01 November 2021.
2023	Terdapat perubahan akta notaris terkait dengan pernyataan keputusan Para Pemegang Saham PT. Balai Kayang Mandiri berdasarkan akta No. 57 yang dibuat oleh Notaris Lanawaty Darmadi, S.H., M.M., M.Kn. pada tanggal 26 April 2023.

1.2. Visi Misi Perusahaan

PT. Balai Kayang Mandiri memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi dan Misi berikut :

Visi

"Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan."

Misi

Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko terendah.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara.

1.3. Kebijakan – Kebijakan Perusahaan

1.3.1. Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan

terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

Kebijakan Komitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

1.3.2. Kebijakan Kelestarian Lingkungan

Menyadari dan memahami bahwa aspek lingkungan merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari, maka PT BKM berkomitmen menjalankan kebijakan lingkungan sebagai berikut:

- a. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional termasuk berbagai konvensi Internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Melakukan perlindungan lingkungan termasuk pencegahan pencemaran lingkungan.
- d. Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest*) sesuai prinsip kehati-hatian.
- e. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat
- f. Menerapkan sistem silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi dan kimia.
- g. Berkontribusi terhadap upaya-upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasi hutan.

- h. Melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak
- i. Melakukan pengendalian spesies eksotik invasif yang terdapat di areal Kawaan Lindung,

1.3.3. Kebijakan Kelestarian Produksi

PT BKM, sebagai perusahaan hutan tanaman yang memasok bahan baku kayu pada industri *pulp* dan kertas lingkup APP, berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).

Untuk mencapai komitmen ini PT BKM menerapkan praktek-praktek pengelolaan hutan sebagai berikut:

- a. Mematuhi semua peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Membangun kemantapan kawasan yang didasarkan pada sistem zonasi yang menjamin keberlangsungan fungsi produksi, lingkungan dan sosial.
- c. Membangun hutan tanaman industri dengan menggunakan jenis tanaman unggul yang bukan merupakan hasil rekayasa genetika atau *Genetically Modified Organism (GMO)*, didukung oleh sistem silvikultur yang tepat dan upaya perlindungan hutan yang efektif untuk mencapai produktivitas lahan.
- d. Pengaturan hasil didasarkan pada daur produktif dan etat (luas dan volume).
- e. Menerapkan sistem pemanenan yang ramah lingkungan dan prinsip keterlacakan bahan baku kayu.

1.3.4. Kebijakan Kelestarian Sosial

PT BKM memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, karyawan & pekerja perusahaan serta berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, PT BKM berkomitmen :

- a. Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*).
- b. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Menerapkan prinsip-prinsip *Free Prior and Informed Consent* (FPIC) untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat di dalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan asas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- e. Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.
- f. Menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) untuk mencapai *zero accident*.
- g. Menyelesaikan konflik dan keluhan/*grievance* secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan.

- h. Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
- i. Keterbukaan akses informasi kepada publik.

1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Sebagai Perusahaan Hutan Tanaman Industri yang memiliki visi menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kami berkomitmen untuk :

- a. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi seluruh karyawan dan orang lain di tempat kerja.
- b. Menetapkan program dan sasaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- c. Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- d. Mengendalikan bahaya dan mengurangi risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- e. Memelihara dan meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara berkelanjutan.
- f. Melibatkan seluruh karyawan dan pihak lain dalam konsultasi dan partisipasi untuk penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan perusahaan.

1.3.6. Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja

PT BKM berkomitmen dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan pekerja, sesuai yang tertuang dalam

konvensi ILO dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut PT BKM menerapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja Laki-laki dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Pekerja Pria Dan Wanita dan Konvensi ILO No.111 tentang diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan.
- b. Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak di bawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- c. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- d. Melarang keras segala bentuk pelecehan seksual dan penyalahgunaan wewenang.
- e. Memastikan terpenuhinya fasilitas pekerja.
- f. Membangun mekanisme pengaduan dan keluhan pekerja secara bertanggungjawab dan terbuka.
- g. Memastikan penerapan sistem K3 dalam semua lingkup pekerjaan.
- h. Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang

Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No.98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.

- i. Dalam keadaan dan kondisi apapun untuk tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa dan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- j. Membayar upah/gaji tidak di bawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- k. Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undangundang dan diikat dalam kontrak kerja.
- l. Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undangundang yang berlaku terkait jam kerja reguler, jam lembur termasuk istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan dikompensasi sesuai aturan perundangan yang berlaku.

1.3.7. Kebijakan Tidak Menggunakan Pestisida yang di Larang

Sejalan dengan pengelolaan hutan lestari, maka salah satu aspek yang penting adalah Unit Manajemen (UM) hutan tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain) , terkait hal tersebut, maka :

- a. Tidak boleh melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),

- b. Tidak boleh menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
- c. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
- d. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*).

1.3.8. Kebijakan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan

Dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari, kami menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut:

- a. Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
- b. Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
- c. Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.
- d. Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.
- e. Secara aktif melibatkan semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

1.3.9. Kebijakan Benturan Kepentingan

PT. BKM berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan, maka dalam memastikan independensi, perilaku profesional dan integritas serta menghindari terjadinya benturan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi, sehingga dapat menyulitkan karyawan

dalam menjalankan tugasnya dan atau menimbulkan hal yang merugikan perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, PT. BKM berkomitmen untuk menghindari hal-hal sebagai berikut :

- a. **Hadiah dan hiburan (*Gift and Enternaiment*)**, adalah situasi dimana karyawan menerima baik secara langsung maupun tidak langsung, memberi atau menjanjikan gratifikasi atau pemberian hadiah/ cinderamata/ jamuan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan dan/ atau jabatan di dalam perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan/ atau menyebabkan karyawan tersebut melakukan suatu tindakan yang menguntungkan pihak pemberi atau perusahaan manapun untuk kepentingan pribadi karyawan.
- b. ***Self-Dealing***, adalah situasi dimana karyawan memiliki, mengelola dan/ atau mengendalikan organisasi/ perusahaan lain dan kemudian menggunakan kedudukan dan/ atau jabatannya di dalam perusahaan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan demi kepentingan/ keuntungan pribadi karyawan itu sendiri, keluarga atau organisasi/ golongan/ perusahaan lain.
- c. **Kepentingan Pribadi/ Keluarga/ Kerabat/ Golongan Tertentu**, adalah situasi dimana karyawan tidak bersikap profesional/ dan diskriminatif serta memberikan akses khusus terhadap pembeli, penyedia barang/ jasa, kontraktor, broker dan/ atau pihak-pihak lain manapun untuk kepentingan dan/ atau perusahaan yang dikendalikan oleh kerabat/ keluarga/ golongan tertentu.
- d. **Hubungan Kekeluargaan**, adalah situasi dimana karyawan memiliki anggota keluarga (*first tier*) yang juga bekerja untuk Perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memiliki perusahaan atau bekerja untuk perusahaan yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan dan/ atau memiliki anggota keluarga yang memiliki perusahaan atau bekerja di perusahaan *competitor* atau LSM/ NGO.

- e. ***Company Assets Abusement***, adalah situasi dimana karyawan menggunakan asset jabatan atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.

- f. ***Confidentiality Abusement***, adalah situasi dimana karyawan menggunakan informasi rahasia jabatan dan/ atau informasi rahasia yang diperoleh melalui perusahaan untuk keuntungan pribadi/ golongan serta memungkinkan orang lain mendapatkan keuntungan dari informasi rahasia tersebut.

BAB II. KONDISI UMUM

2.1. Gambaran Umum

Gambaran letak areal kerja berdasarkan letak geografis, letak administrasi pemerintahan, letak administrasi kehutanan, dan batas-batasnya di lapangan secara rinci disajikan pada dan Tabel 2.

Tabel 2. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. BKM

No	Uraian	Blok Minas 1	Blok Minas II	Blok Serkap
1	Luas Areal Kerja	3.289 Ha	5.381 Ha	7.844 Ha
2	Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Siak, Provinsi Riau	Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Propinsi Riau
3	Letak Geografis	101° 52' 33"- 101° 55' 30" BT; 01° 03' 09"- 01° 08' 23" LU	100° 49' 33"- 101° 57' 30" BT; 00° 57' 09"- 01° 00' 33" LU	102° 21' 30"- 102° 33' 15" BT; 00° 37' 03"- 00° 41' 58" LU
4	Letak KPH	Tasik Besar Serkap	Tasik Besar Serkap	Tasik Besar Serkap
5	Letak DAS	Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil	Sungai Siak-Sungai Siak Kecil	Sungai Siak-Sungai Kampar
6	Wilayah Pemangkuan Hutan	Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Dinas Kehutanan Provinsi Riau
7	Kelompok Hutan	Sungai Metas	Sungai Siak Kecil	Sungai Siak Kecil
8	Tinggi dari permukaan	18 - 50 m dari permukaan laut		
9	Iklim - Tipe iklim - Curah hujan tertinggi - Curah hujan terendah	- Iklim basah (Tipe A berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt and Ferguson) dengan nilai Q = 2 % - 462,8 mm - 181,9 mm		
10	Kondisi Topografi - Datar (0-8%) - Landai (8-15%) - Agak curam (15-25%) - Curam (25-40%) - Sangat curam (>40%)	3.289 Ha (20%) - - - -	5.381 Ha (33%) - - - -	7.844 Ha (47%) - - - -
11	Formasi Geologi	Aluvium, Teroce defosits dan Coral reefs		
12	Tipe tanah - Gambut - Mineral	3.289 Ha (20%) -	5.381 Ha (33%) -	7.844 Ha (47%) -
13	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	Sungai Siak-Sungai Siak Kecil	Sungai Rokan-Sungai Siak Kecil	Sungai Siak Kecil-Sungai Kampar

Sumber: Dokumen RKUPHHK-HT Periode 2017-2026 tahun 2019

2.2. Keanekaragaman Flora dan Fauna

Jenis-jenis flora yang ada di areal PT. BKM adalah sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jenis Flora di PT. BKM

No.	Spesies	Nama Umum	Status Konservasi			Pengelolaan
			IUCN	CITES	PP	
1	<i>Anisoptera marginata</i>	Mersawa	EN			- Larangan penebangan atau pengambilan kayu - Penandaan, perbanyakan dan penanaman jenis
2	<i>Calanthe</i>	Anggrek		Ap II	PP.106/	- Larangan pengambilan

	<i>triplicata</i>	tanah			2018	jenis - Penandaan
3	<i>Coelogyne asperata</i>	Anggrek -		Ap II		- Larangan pengambilan jenis - Penandaan
4	<i>Gonystylus bancanus</i>	Ramin	VU	Ap II	SK MENHUT. 127/2001	- Larangan penebangan atau pengambilan kayu - Penandaan, perbanyak dan penanaman jenis
5	<i>Grammaphyllum speciosum</i>	Anggrek tebu		Ap II	PP.106/ 2018	- Larangan pengambilan jenis - Penandaan
6	<i>Nepenthes ampullaria</i>	Kantong semar		Ap II	PP.106/ 2018	- Larangan pengambilan jenis - Penandaan
7	<i>Nepenthes gracilis</i>	Kantong semar		Ap II	PP.106/ 2018	- Larangan pengambilan jenis - Penandaan
8	<i>Nepenthes rafflessiana</i>	Kantong semar			PP.106/ 2018	- Larangan pengambilan jenis - Penandaan
9	<i>Shorea platycarpa</i>	Meranti merah	CR			- Larangan penebangan atau pengambilan kayu - Penandaan, perbanyak dan penanaman jenis
10	<i>Shorea teysmanniana</i>	Meranti bunga	EN			- Larangan penebangan atau pengambilan kayu - Penandaan, perbanyak dan penanaman jenis
11	<i>Shorea uliginosa</i>	Meranti buaya	VU			- Larangan penebangan atau pengambilan kayu - Penandaan, perbanyak dan penanaman jenis

Keterangan

- Sumber : PT. Ekologika Consultants, 2014. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT. Sekato Pratama makmur. Bengkalis, Riau – Indonesia
- IUCN : VU = *Vulnerable*; EN = *Endangered*; CR = *Critically Endangered*; LC = *Least Concern*
- App I / II = Appendix CITES
- PP = Peraturan Pemenintah (SK Menteri Pertanian No. 54 Kpts Um 2 Tahun 1972, SK Menhut No. 127 Tahun 2001, P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018, P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018)

Areal kawasan lindung PT. BKM juga dihuni oleh cukup banyak satwa liar dan beberapa diantaranya adalah jenis dilindungi, seperti : Harimau Sumatera, Siamang, Beruang Madu, Rusa, Monyet Ekor Panjang, Rangkong, Burung Enggang, Elang Hutan, Elang Rawa, Raja Udang, Srigunting, Ular Kobra, Labi-labi. Daftar fauna terlampir sebagai berikut:

Tabel 4. Jenis Fauna di PT. BKM

Mamalia

No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
1	Beruang madu	<i>Helarctos malayanus</i>	VU	I	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
2	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>	VU	II	
3	Harimau Sumatra	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	CR	I	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
4	Kancil	<i>Tragulus javanicus, Tragulus napu</i>	LC		UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
5	Kucing buluh	<i>Pardofelis marmorata</i>	VU	I	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
6	Kucing hutan	<i>Prionailurus bengalensis</i>	VU	II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
7	Kukang	<i>Nycticebus coucang</i>	VU	II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
8	Lutung bergaris	<i>Presbytis femoralis, Presbytis melalophos</i>	Nt	II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
9	Macan dahan	<i>Neofelis diardi diardi</i>	EN	I	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
10	Monyet ekor panjang	<i>Macaca fascicularis</i>	VU	II	
11	Owa ungko	<i>Hylobates agilis ungko</i>	EN	I	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
12	Rusa	<i>Rusa unicolor</i>	VU		UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
13	Tapir	<i>Tapirus indicus</i>	EN	I	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2019

Keterangan

- IUCN = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered

- I / II = Appendix CITES

Aves

No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
1	Baza hitam	<i>Aviceda leuphotes</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
2	Elang alap jambul	<i>Accipiter trivirgatus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
3	Elang brontok	<i>Nisaetus cirrhatus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
4	Elang ikan kepala kelabu	<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018

No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
5	Elang ular bido	<i>Spilornis cheela</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
6	Elang tikus	<i>Elanus caeruleus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
7	Sikep madu asia	<i>Pernis ptilorhynchus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
8	Alap-alap capung	<i>Microhierax fringillarius</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
9	Betet ekor-panjang	<i>Psittacula longicauda</i>		II	
10	Serindit melayu	<i>Loriculus pusillus</i>		II	
11	Beluk ketupa	<i>Ketupa ketupu</i>		II	
12	Luntur kasumba	<i>Harpactes kasumba</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
13	Cekakak belukar	<i>Halcyon smyrnenensis</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
14	Pekaka emas	<i>Pelargopsis capensis</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
15	Raja udang meninting	<i>Alcedo meninting</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
16	Udang punggung merah	<i>Ceyx rufidorsa</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
17	Eggang kelihingan	<i>Anorrhinus galeritus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
18	Kangkareng hitam	<i>Anthracoceros malayanus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
19	Kangkareng perut putih	<i>Anthracoceros albirostris</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
20	Julang emas	<i>Aceros undulatus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
21	Julang jambul hitam	<i>Aceros corrugatus</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
22	Rangkong badak	<i>Buceros rhinoceros</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
23	Empuloh paruh kait	<i>Setornis criniger</i>	VU		
25	Kipasan belang	<i>Rhipidura javanica</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
26	Tiong emas	<i>Gracula religiosa</i>		II	UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
27	Burung madu belukar	<i>Anthreptes singalensis</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
28	Burung madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
29	Burung madu pengantin	<i>Nectarinia sperata</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
30	Burung madu rimba	<i>Hypogramma hypogrammicum</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018

No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
31	Burung madu sepah raja	<i>Aethopyga siparaja</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
32	Pijantung besar	<i>Arachnothera robusta</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
33	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018
34	Pijantung tasmak	<i>Arachnothera flavigaster</i>			UU No. 5 thn 1990, PermenLHK No. P.20 thn 2018, PermenLHK No. P.106 thn 2018

Keterangan

- IUCN = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered

- I / II = Appendix CITES

Reptilia

No	Nama	Nama Latin	IUCN	CITES	Peraturan Pemerintah
1	Biawak, biancak	<i>Varanus salvator</i>		II	
2	Kobra, tedung	<i>Naja sumatrana</i>		II	
3	Tedung	<i>Ophiophagus hannah</i>	VU	II	
4	Sanca kembang, sawa	<i>Brogammerus reticulatus</i>		II	
5	Labi-labi	<i>Amyda cartilaginea</i>	VU	II	

Keterangan

- IUCN = VU : Vulnerable; EN : Endangered; CR : Critically Endangered

- I / II = Appendix CITES

2.3. Tata Ruang

Berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Permen LHK No. P.10/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut, sehingga perusahaan melakukan perubahan / revisi Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK-HTI) periode 2017-2026. PT. Balai Kayang Mandiri mengalami perubahan tata ruang dengan komposisi akhir seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5 berikut;

Tabel 5. Tata Ruang PT. Balai Kayang Mandiri

No	Rencana Peruntukan	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	11.046,52	66,89	* Areal puncak kubah gambut total seluas ±3.377,79 Ha seluruhnya berada pada areal Kawasan Lindung Gambut. ** Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya untuk pemanfaatan HHBK dan atau Jasa lingkungan
a.	Sempadan Sungai	411,44	2,49	
b.	KPPN	433,00	2,62	
c.	KPSL	291,00	1,76	
d.	Buffer Zone Hutan Lindung	2.239,00	13,56	
e.	Kawasan Lindung Gambut	7.672,08	46,46	
f.	FEG (TK, TP)	-	-	
g.	Areal Puncak Kubah Gambut *	-	-	
2.	Tanaman Pokok	3.971,00	24,05	
3.	Tanaman Kehidupan **	1.496,48	9,06	
	Luas Areal IUPHHK-HTI	16.514,00	100,00	

Sumber: SK Revisi RKU PT. BKM periode 2017-2026, Tahun 2019

2.4. Penentuan Jenis Tanaman

Untuk areal tanaman pokok, jenis tanaman yang dipilih untuk dikembangkan di **PT. Balai Kayang Mandiri** adalah *Acacia crassicarpa*. Pertimbangan pemilihan jenis tanaman ini adalah:

- a. Tanaman *Acacia crassicarpa* cocok tumbuh di lahan basah.
- b. Pertumbuhan cepat, kulminasi riap pada umur muda, batang relatif lurus, dapat ditanam dengan mudah dan murah.
- c. Mempunyai kadar selulosa tinggi, mempunyai kadar lignin rendah, warna cerah dan zat ekstraktif rendah.
- d. Cukup resisten terhadap lahan yang tingkat keasamannya tinggi.

2.5. Kondisi Sosial Ekonomi

• Kondisi Sosial Ekonomi

Mengingat bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang tergantung pada hutan, maka sasaran bina desa hutan adalah masyarakat yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Demikian juga kegiatan-kegiatannya diarahkan pada bentuk-bentuk kegiatan yang cocok dengan kelompok masyarakat tertentu, yang dirumuskan dalam dokumen studi diagnostik PMDH. Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan rencana kegiatan PMDH adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi; pemaduan kegiatan PMDH dengan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain
2. Koordinasi (kerjasama dan konsolidasi), baik dengan internal perusahaan maupun dengan pihak lainnya
3. Partisipatif; memberikan kesempatan yang luas kepada setiap pihak, khususnya masyarakat binaan untuk aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
4. Orientasi kebutuhan dan kontinuitas, termasuk melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebagai upaya pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar.

Beberapa kegiatan pembinaan masyarakat yang telah dilaksanakan diantaranya adalah pelatihan ketrampilan pemuda,

pelayanan kesehatan masyarakat bekerjasama dengan Puskesmas setempat, pembinaan mental spiritual masyarakat bekerjasama dengan juru da'wah dan ulama setempat, penyuluhan masalah lingkungan, partisipasi pembangunan sarana-prasarana desa, seperti jalan, tempat ibadah, bangunan sekolah dan lain-lain.

Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya, perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui penyediaan lapangan kerja, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

BAB III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Balai Kayang Mandiri dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari yang memperhatikan aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

3.1. ASPEK PRODUKSI

3.1.1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional PT. BKM telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKUPHHK-HT). RKUPHHK-HT ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan. RKT selanjutnya menjadi dasar legal di dalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

3.1.2. Tata Batas

Kegiatan tata batas dilakukan untuk memperoleh ketegasan atas batas administrasi, kewenangan maupun hukum atas areal hutan tanaman yang jelas. guna menjamin kepastian hukum kawasan mengenai status, batas, letak dan luas areal kerjanya. Pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Balai Kayang Mandiri di kabupaten Siak Provinsi Riau telah dilaksanakan berdasarkan pedoman tata batas / Pernyataan No. 131/PB/IUPHHK-HT/2008 tanggal 25 September 2008 dan Instruksi Kerja Tata Batas No.IK 01/VII/BPKHXII-2/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang pelaksanaan pengukuran dan penataan batas sendiri dan persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Rokan Perkasa, PT. Bina Daya Bintara, PT. Putra Riau Perkasa, PT. Seraya Sumber Lestari dan PT. National Timber And Forest Product di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Luas definitif areal kerja PT. BKM ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 57/Menhut-II/2013 tentang penetapan batas areal kerja IUPHHK – HT PT. Balai Kayang Mandiri blok Minas I seluas 3.289 Ha, blok Minas II seluas 5.381 Ha, dan blok Tasik Besar Serkap seluas 7.844 Ha di Kabupaten Siak Provinsi Riau pada tanggal 23 Januari 2013. Dengan penetapan batas tersebut, diharapkan areal kerja akan menjadi kawasan hutan produksi yang diharapkan aman dan bebas konflik dalam jangka panjang.

3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan/Sarana dan Prasarana

PT. BKM melaksanakan kegiatan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan, base camp. dan sarana prasarana lainnya. Standar teknis PWH telah ditetapkan secara internal oleh perusahaan untuk memberikan petunjuk dan batasan teknisnya bagi pelaksana di lapangan. Pembangunan jaringan kanal dan jalan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. dimana sebelumnya telah dibuat desain kanal dan jalan berdasar hasil survey detail situasi dan hidrologi. Jaringan kanal di lahan rawa dibuat selain mempunyai fungsi utama sebagai jalur transportasi, juga sebagai pengatur tinggi muka air dan untuk mendapatkan daerah perakaran yang optimal bagi tanaman.

Tabel 7. Daftar Kegiatan PWH PT. BKM Tahun 2023

No.	Kegiatan	Spesifikasi	Rencana		Realisasi	
1.	Service Kanal	Primer	8,3	Km	8,1	Km
		Sekunder	9,2	Km	11.1	Km
2.	Service Jalan	Jalan utama	10,0	Km	10.0	Km
		JalanCabang	0	Km	0	Km
3.	Pembangunan Water – Gate		1	Unit	0	Unit

Sumber: Data dari bagian Infrastruktur Distrik

Dan untuk mendukung kegiatan sehari-hari di distrik Bunga Raya, berikut terlampir sarana dan prasarana yang sudah dibangun:

Tabel 8. Daftar Sarana dan Prasarana PT. BKM tahun 2023

Jenis	Jumlah	Keterangan
Mess Pimpinan	1	2 pintu
Mess Tamu	1	6 Pintu
Instalasi Listrik	1	Genset 30 dan 50 Kva
Poliklinik	1	Pos P3K
Mesjid	1	Musholla

Jenis	Jumlah	Keterangan
Fasilitas Olahraga	1	Lapangan bola kaki
Camp Terapung	1	Camp Apung
Tower Air	2	
Mess Karyawan	2	14 Pintu
Kantor	1	Kantor permanen
Gudang	1	Gudang container
Kantin	1	Kantin Permanen

Sumber: Data dari lapangan

3.1.4. Penetapan Sistem Silvikultur

Kegiatan silvikultur dalam pembangunan hutan tanaman merupakan suatu teknik/proses dimulai dari kegiatan penyiapan lahan, persemaian, penanaman, dan pemeliharaan, serta penebangan. Perusahaan didalam pembangunan hutannya memilih sistem silvikultur **THPB** (Tebang Habis Permudaan Buatan) dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut :

- Tujuan pembangunan hutan tanaman, yaitu untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku industri pulp PT. Indah Kiat Pulp and Paper. Berdasarkan pertimbangan ini maka sistem silvikulturnya diarahkan untuk menghasilkan kayu yang memenuhi persyaratan industri pulp.
- Kondisi pada areal hutan tanaman dilapangan.
- Ketersediaan teknologi pendukung.

Pengelolaan dan penanganan lahan di areal gambut mempunyai tantangan tersendiri, perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang dengan didukung oleh teknologi yang memadai. Pengaturan tinggi muka air (*water level*) merupakan faktor penting dalam keberhasilan pertumbuhan tanaman.

3.1.5. Pengadaan Bibit

Dalam tahap awal pembangunan hutan tanaman PT. BKM, produksi benih dan bibit berasal dari PT. Bukit Batu Hutani Alam. Rencana pengadaan bibit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Rencana dan Realisasi Pengadaan Bibit Tanaman PT. BKM

RKT Tahun	Pembibitan (Btg)		Persentase Pencapaian
	Rencana	Realisasi	
2022	958.340	893.759	93,26%
2023	1.090.148	820.532	75,27%

3.1.6. Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan/atau tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. BKM menerapkan prinsip Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (**PLTB**).

3.1.7. Penanaman

Acacia crassicarpa cocok dikembangkan di areal PT. BKM, hal ini berdasarkan kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh bagian Riset. Namun tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mengembangkan tanaman lain sebagai tanaman pokok. Penanaman dilakukan secara manual dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Penanaman dilakukan pada petak yang telah dilakukan pengukuran, jarak tanam yang diatur sesuai dengan kaidah silvikultur, jarak tanam yang dibuat adalah 3 m x 2 m.

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Penanaman PT. BKM

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase
2022	522,94	488,70	93,26%
2023	663,41	601,10	91%

3.1.8. Pemeliharaan Tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (singling), dan penyiangan (weeding). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Data pemakaian pupuk dan pestisida dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Rekap Pemakaian Pestisida, Herbisida dan Pupuk di PT. BKM Tahun 2023

No	Jenis Material	Satuan	TOTAL
Pestisida&Herbisida			
1	Glyosat	L	4084
2	Kixor	gr	74.780

3	Miracle	ml	29.868
5	Starane	ml	5.700
7	Tar	L	125
Pupuk			
1	NPK	Kg	125.762
2	TSP	Kg	0
3	PTA-12	Bag/20 kg	30.045
4	KCL	Kg	26.905
5	Borrate	Kg	0
6	Zinc Copper	Kg	815
Limbah B3			
1	Kemasan Jerigen Bekas Pestisida	Ton	0.0481
2	Kemasan Botol Bekas Pestisida	Ton	0.0090
3	Botol Oli Bekas	Ton	0.0050

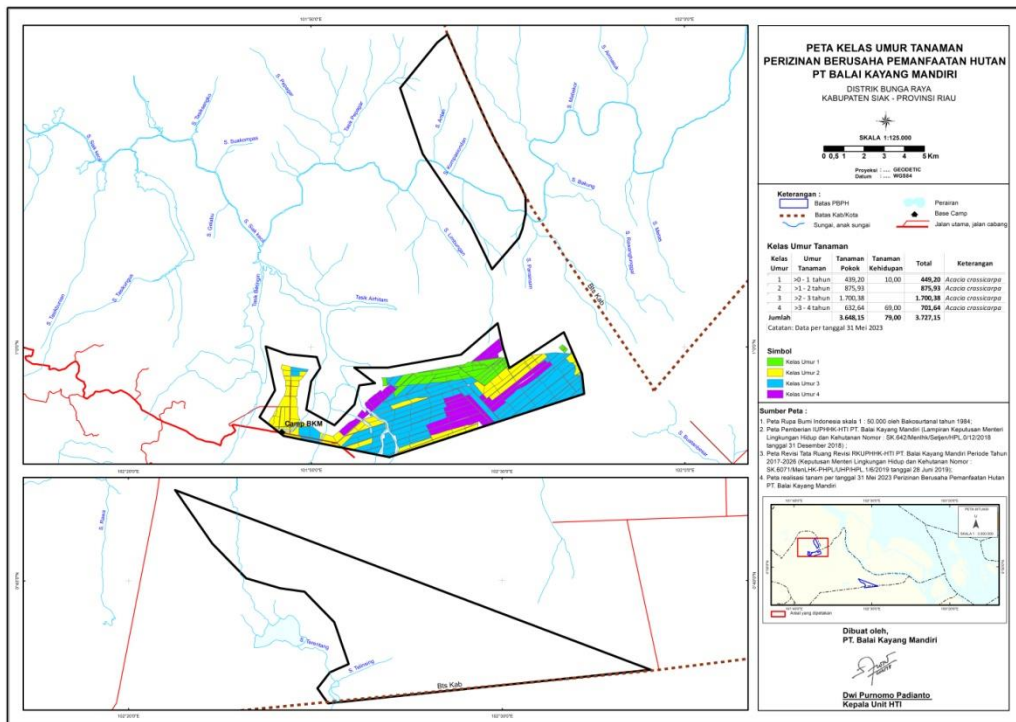
Sumber: Data dari lapangan

3.1.9. Kelas Umur Tanaman

Kelas umur adalah suatu kumpulan atau kelompok hutan yang memiliki umur yang sama. Oleh karena itu angka riap yang diperoleh merupakan nilai rata-rata dari setiap plot pada masing-masing kelas umur tanaman. Berdasarkan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi, KLHK, tahun 2015 menunjukkan jenis tanaman *Accasia crassicarpa* mempunyai daur optimal 5 tahun dengan riap pada kelas bonita V dapat mencapai 34,14 m³/ha/thn dan volume panen sebesar 170,72 m³/tahun. Berikut disajikan data kelas umur dan Peta Kelas umur tanaman HTI PT. BKM:

Tabel 12. Data Kelas Umur Tanaman PT. BKM

Kelas Umur	Umur Tanaman	Tanaman Pokok	Tanaman Kehidupan	Total	Keterangan
1	0-<1 tahun	1,433.89	-	1,433.89	<i>Acacia crassicarpa</i>
2	1-<2 tahun	1,771.36		1,771.36	<i>Acacia crassicarpa</i>
3	2- <3 tahun	51.50	69.00	120.50	<i>Acacia crassicarpa</i>
4	3-<4 tahun	346.90		346.90	<i>Acacia crassicarpa</i>
4 up	4 tahun keatas	16.10		16.10	<i>Acacia crassicarpa</i>
Jumlah		3,619.75	69.00	3,688.75	



Gambar 1. Peta Kelas Umur PT. BKM

3.1.10. Pengukuran Riap Tanaman

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk meningkatkan nilai hutan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Parameter kuantitatif nilai hutan produksi antara lain oleh jumlah batang, luas bidang dasar, pertumbuhan riap dan volume kayu yang dapat dimanfaatkan per satuan areal. Sedangkan secara kualitatif nilai hutan produksi ditentukan antara lain: struktur tegakan, bentuk batang, tinggi bebas cabang dan tidak cacat. Untuk mengetahui dan mengamati riap pertumbuhan tanaman tersebut perlu dibuat Petak Ukur Permanen (PUP) pada setiap kegiatan penanaman yang diamati secara periodik.

3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

3.1.11.1. Hama dan Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Adapun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.

- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestotlatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).
- Gulma, terdiri dari rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakistan.

Dalam upaya pengendalian populasi hama dan penyakit di tegakan, operasional plantation akan mengkombinasikan metode-metode pengendalian yang ada secara kompatibel, yaitu penggunaan lahan tanam yang terseleksi dari kontaminasi hama dan penyakit serta memiliki pertumbuhan yang baik, pengendalian secara silvikultur (pengaturan jarak tanam, pemupukan, sanitasi areal/penyiangan), penggunaan agensia hayati (cendawan *Trichoderma* sp., *Glyocladium* sp., *Beauveria bassiana*) dan aplikasi pestisida sebagai langkah/alternatif terakhir. Berikut data serangan hama penyakit pada tanaman akasia;



Gambar 2. Jenis serangan Hama Penyakit Tanaman

3.1.11.2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Areal kerja PT BKM memiliki curah hujan yang sangat kecil dan berpotensi tinggi kejadian kebakaran lahan, baik lahan HTI maupun lahan masyarakat. Selain itu, ekosistem gambut yang terdrainase menjadikan ekosistem tersebut menjadi rawan kebakaran terutama pada musim kemarau. Penyebab kebakaran berasal dari alami maupun akibat kegiatan manusia. Praktek pembukaan lahan dengan pembakaran diduga menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan. Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan kebakaran, PT BKM telah membentuk unit penganggulangan kebakaran dan kerjasama dengan masyarakat di sekitar konsesi melaksanakan

program Masyarakat Peduli Api (MPA). Selain itu, patroli kebakaran juga telah dibangun untuk memonitor kondisi kawasan terutama di musim kemarau.

Tabel 16. Kejadian kebakaran di PT. BKM

Tahun Kejadian	Distrik	Luas (ha)	Keterangan
2022	Bunga Raya	0 Ha	
2023	Bunga Raya	0 Ha	

3.1.12. Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKT untuk menjamin kelestarian hasil (sustainable yield). Perusahaan telah merancang standar teknis pelaksanaan pemanenan (harvesting) yang efisien dan baik bagi kelestarian lingkungan. Berdasarkan jenis tanahnya, di PT. BKM merupakan jenis tanah gambut, sehingga alur pemanenannya berbeda dengan tanah mineral. Rencana dan Realisasi pemanenan PT. BKM dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 17. Rencana dan realisasi pemanenan PT. BKM

RKT	RENCANA (HA)	REALISASI (HA)	PERSENTASI
2022	385,60	385,60	100%
2023	603,70	603,70	100%

3.2. ASPEK EKOLOGI

Dasar kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT. BKM yaitu berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Daerah Provinsi Riau dengan No. 188/PPLHK/874 pada tanggal 10 Maret 2020. Dokumen ini merupakan Revisi Andal yang pertama yang disahkan oleh Bupati Siak dengan No. 660/BPDL/462/2003.

a. Pengelolaan Kawasan Lindung

Berdasarkan RKU terbaru Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. BKM merupakan Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL), Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Buffer Zone Hutan Lindung (BZHL), Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan Sempadan Sungai (SS) dengan total luas 11.046,52 Ha. Rencana kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan adalah pemasangan batas, pemasangan papan peringatan, rehabilitasi berupa penanaman dan regenerasi alami, inventarisasi dan identifikasi flora fauna, penyuluhan kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat, serta kegiatan patroli pengamanan kawasan lindung.

b. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi dan satwa yang tersebar di sekitar areal hutan diantara vegetasi dan satwa tersebut teridentifikasi jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi berdasarkan CITES, IUCN, serta peraturan lokal yang mengaturnya. Pengelolaan dan pemantauan Flora dan Fauna di PT. Balai Kayang Mandiri dimuat dalam bentuk laporan Biodiversiti.

c. Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan pembangunan HTI di PT. Balai Kayang Mandiri menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak yang terjadi akibat kegiatan ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup mahluk hidup disekitarnya. Limbah B3 PT. BKM disimpan digudang LB3 yang sudah mendapatkan izin dari dinas terkait dengan No. 08/DPMPTSP-IPLB3S/KPTS/2018. Pengelolaan Limbah B3 telah diatur dalam SOP tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Pengelolaan dan Pemantauan NKT

Perusahaan telah melaksanakan identifikasi NKT yang dilakukan oleh konsultan Ekologika. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat NKT pada areal kawasan PT. BKM. Berikut disajikan tabel hasil identifikasi NKT.

Tabel 17. Ringkasan penilaian awal NKT di areal konsesi BKM

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Keanekaragaman Hayati Penting	1.1	Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (<i>viable population</i>).	ADA
	1.4	Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer	ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami	ADA

	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	TIDAK ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA
NKT 3 – Ekosistem Langka atau Terancam Punah	3	Ekosistem langka atau terancam punah	ADA
NKT 4 – Jasa Lingkungan	4.1	Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir	ADA
	4.2	Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi	TIDAK ADA
	4.3	Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan atau lahan	ADA
NKT 5 –Kebutuhan Dasar untuk Masyarakat	5	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	ADA
NKT 6 – Identitas Budaya Masyarakat	6	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	TIDAK ADA

e. Kegiatan Rehabilitasi

Komitmen perusahaan terhadap kawasan lindung adalah dengan menjaga dan merawat kawasan tersebut. Pengelolaan areal yang rusak pada kawasan lindung yaitu dengan dilakukan proses rehabilitasi PT. BKM sudah melakukan kegiatan rehabilitasi untuk areal-areal yang teridentifikasi terdegradasi secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang ada.

Tabel 18. Rencana dan Realisasi Rehabilitasi PT. BKM

Tahun	Areal	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Keterangan
2021	Sempadan Sungai	2	2	
2022	Buffer Zone	2	0	
2023	SM GSK	2	0.4	

Sumber: Data dari Lapangan

f. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan, penebangan liar kayu alam di kawasan lindung, bahaya

perburuan satwa liar yang dilindungi dan gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

3.3. ASPEK SOSIAL

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian lingkungan atau ekologi, dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan, serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

Bentuk Kepedulian perusahaan HTI adalah mengembangkan Corporate Social Responcibility (CSR) yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti penanggulangan kemiskinan, menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, beasiswa, peningkatan skill, peningkatan daya beli masyarakat sekitar HTI, dan membantu membangun infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk didalamnya fasilitas air bersih.

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

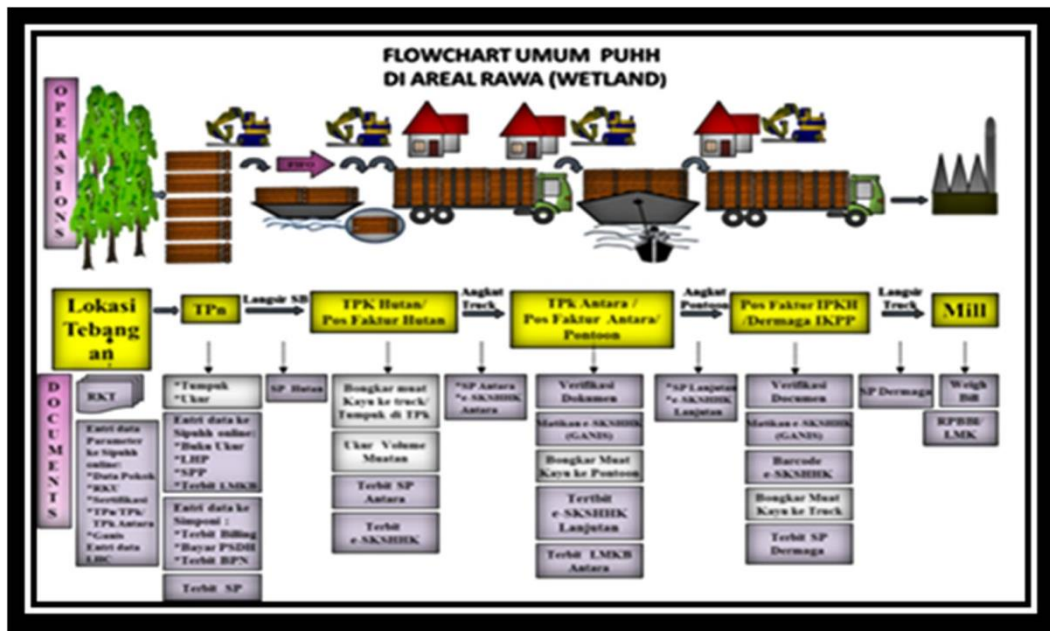
4.1. Aspek Produksi

Tabel 18. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi Tahun 2023

No	Parameter	Rencana	Realisasi	%	Keterangan
1	Tanam (Ha)	663,41	601,10	91	
2	Tebang (Ha)	603,70	603,70	100,00	
3	Produksi (M3)	73.350,49	67.839,47	92	
4	Survey Permanen Sample Plot (PSP)				
	a. Jumlah Plot	22	22	100	
	b. Luas (Ha)	4.4	4.4	100	

4.1.1. Monitoring dan evaluasi CoC

CoC (*Chain of Custody*) adalah jalur yang dilalui bahan baku kayu dari petak kerja tebang sampai mill gate, termasuk setiap tahap pengelolaan, transformasi, transportasi, penyimpanan dimana langkah dari simpul ke simpul pergerakan kayu. Metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi CoC antara lain dengan mereview dokumen, interview, dan observasi lapangan. Materi pelaksanaan monitoring dan evaluasi CoC antara lain implementasi proses CoC disetiap simpul pergerakan kayu yang mengacu sesuai SOP CoC, Pemahaman PIC dan petugas CoC disetiap simpul pergerakan kayu, serta kelengkapan implementasi dokumen-dokumen yang digunakan disetiap simpul pergerakan kayu. Adapun teknis pemanenan dilahan gambut sebagai berikut:



Gambar 3. Alur lacak balak dilahan gambut

4.2. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. BKM berjalan sesuai dengan rencana, meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan. Berikut tabel monev pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2023 PT. Balai Kayang Mandiri.

Tabel 19. Monev Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. BKM Tahun 2023

No.	Kegiatan Pemantauan	Sasaran	Volume Kegiatan	PIC	Realisasi
A	Kawasan Lindung dan HCV				
1	Pemantauan identifikasi flora dan fauna (Survey Biodiversity)	Buffer Zone SM Giam Siak Kecil	1 Jalur	FSC, PS	Terealisasi dibulan Januari 2023
2	Monitoring PSP HCS	Buffer Zone SM Giam Siak Kecil	1 x	FSC, PS	Terealisasi dibulan Januari 2023
3	Monitoring Satwa Insidentil	Seluruh konsesi	Temporary	Pengawas lapangan, FSC, EO	Rekapitulasi dilakukan oleh pihak FS
4	Patroli Pengamanan Hutan	DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)	Temporary	Security, FP, PS, EO	Patroli dilakukan secara rutin bersama dengan PRKH dan FP serta PS dilakuan minimal sekali sebulan
		Buffer Zone SM Giam Siak Kecil	12x		
B	Areal Efektif Untuk Produksi				
1	Pemantauan fisik dan kimia tanah	TPO (P. 003, P.050, P.147)	1 x,	WM, EO	Dilakukan 1x setahun di 3 Lokasi dan dilakukan pengujian fisik dan kimia tanah di laboratorium
2	Pemantauan Satwa Liar di TPO	TPO (3 Jalur Transek)	1 x	PS, EO	Terealisasi dibulan Januari 2023
3	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok	Harian	Plantation, EO	Dilakukan oleh pihak FR untuk tanaman umur 12, 18, 24,36 dan 48 bulan
4	Pengukuran Water Table (WT)	Areal TPO	Mingguan	WM, EO	Pengukuran dilakukan setiap minggu
5	Pengukuran Water Level (WL)	Areal TPO	Mingguan	WM, EO	Pengukuran dilakukan setiap minggu

No.	Kegiatan Pemantauan	Sasaran	Volume Kegiatan	PIC	Realisasi
6	Pemantauan subsidi	Areal TPO (P.m22, P.125, P.09, P.9210, P.103, P.24)	12 x	WM, EO	Pemantauan dilakukan 12 x setahun
7	Patroli Pengamanan Hutan	Blok RKT	12 x	Security, FP, PS, EO DAN FSC	Patroli dilakukan minimal sekali sebulan
C.	Areal Tidak Efektif Untuk Produksi				
1	Pengambilan sample air permukaan	Efluen 1	2 x	WM, EO	
		Efluen 2	2 x	WM, EO	
2	Pengukuran Curah Hujan	Kantor distrik	Harian	FP, EO	Direkap 1 x sebulan
3	Pencatatan Kelembaban dan Temperatur Udara	Kantor distrik	Harian	FP, EO	Direkap 1 x sebulan
4	Pemantauan limbah B3	Gudang B3	12 x	GA, EO, FS	Direkap 1 x sebulan
5	Sanitasi lingkungan	Lingkungan Kantor dan Mess	12 x	GA, EO, FS	Melakukan pemantauan tingkat kebersihan, penanaman taman, pengelolaan sampah secara visual

No.	Kegiatan Pengelolaan	Sasaran	Volume Kegiatan	PIC	Realisasi
A	Kawasan Lindung dan HCVF				
1	Perawatan Papan Informasi/ Himbauan/ Larangan	Buffer Zone SM GSK Riparian Zone Sungai Air Hitam DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)	2 pcs	FP, PS, dan FS	Pemasangan sebanyak 1 pc terkait penggantian terhadap papan yang telah rusak
	Pemasangan Papan Informasi/Himbauan/Larangan	Kawasan Lindung Fungs Buffer Zone (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1) Pada Blok Minas I dan Blok Minas II Kawasan Lindung Fungs Buffer Zone, DPSL dan KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1) Pada Blok Minas I dan Tasik Besar Serkap	6 pcs	FP, PS, dan FS FP, PS dan FS	Terealisasi sebanyak 4 unit dan pemasangan digabungkan dengan pemasangan kawasan buffer zone dan sempadan sungai
2	Identifikasi kawasan lindung yang terdegradasi	Buffer Zone SM GSK, DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)	1 x/pertahun	PS,HSE, FSC	Pengecekan via goundchecking pada saat perawatan tata batas kawasan lindung dan via drone bersama team planning survey
3	Pemasangan Batas Kawasan Lindung Fungsi Sempadan Sungai Sepanjang 10 km	Sempadan Sungai	10 km	FSC, PS, FS	realiasi sepanjang 8.7 Km dikawasan Sempadan Sungai
4	Perawatan Pal Batas Kawasan Lindung Fungsi Buffer Zone	Buffer Zone SM GSK	8 KM	FSC, PS, FS	Penggantian Signplate yang telah hilang atau yang telah rusak
6	Rehabilitasi kawasan lindung	Sempadan Sungai	2 ha	FSC, PS, FS	0.4 Ha KL SM GSK

No.	Kegiatan Pengelolaan	Sasaran	Volume Kegiatan	PIC	Realisasi
7	Penandaan pohon dilindungi	Pada areal Tan. Pokok dan Tan. Kehidupan	-	PS,HSE, FS	Sudah dilakukan dilokasi MBRC055-01 untuk RKT 2022
8	Pengaturan Tata Air/Water Management	DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)	Harian	WM, HSE	Pengendalian WT-WL guna untuk menjaga tinggi muka air gambut
		Buffer Zone SM GSK	Harian		
9	Patroli Perlindungan Hutan (darat)	DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)	setiap bulan	Humas, FP, PS, FS	patroli dilakukan oleh pihak Security, Pihak FS, Pihak FP
		Buffer Zone SM GSK			
10	Patroli Perlindungan Hutan (udara)	DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)	1 x/pertahun	Humas, FP, PS, FS	Dilakukan bersamaan dengan patroli kebakaran, dan untuk pengecekan via drone dilakukan rutin perbulan baik oleh PS maupun RPK
		Buffer Zone SM GSK	1 x/pertahun		
11	Sosialisasi	Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar	1 x/pertahun	FP, PS, FS	Realiasi pelaksanaan di 3 desa yaitu Tuah Indrapura, Desa tasik Betung dan Desa ZPenyengat
B	Areal Efektif Untuk Produksi				
1	Pengaturan Water Level dan Water Table	Seluruh konsesi	Harian	WM,FS-HSE	Dilakukan setiap hari oleh pihak WM dan didampingi oleh pihak FS untuk memastikan kondisi WL-WT terjaga
2	Perawatan Kanal & bangunan air	Kanal Sekunder		WM,HSE	Berupa kegiatan servis kanal dan perbaikan bendungan yang telah dibuat sebelumnya
		Kanal Primer		WM,HSE	Berupa kegiatan servis kanal dan penggantian pintu air yang telah rusak dan perbaikan bendungan kanal yang telah dibuat sebelumnya

No.	Kegiatan Pengelolaan	Sasaran	Volume Kegiatan	PIC	Realisasi
3	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai prosedur	Blok RKT 2023	Harian	Plantation	Aplikasi herbisida / pestisida sebanyak 4.084 liter untuk kegiatan perawatan
4	Penanaman sesuai jadwal yang ditentukan	Blok RKT 2023	Harian	Plantation	teralisasi seluas 599.2 Ha
5	Persiapan lahan tanpa bakar	Blok RKT 2023	Harian	Harvesting	teralisasi seluas 692 Ha
C. Areal Tidak Efektif Untuk Produksi					
1	Patroli Perlindungan Hutan	Seluruh konsesi	setiap bulan	Security, FP, PS, FS	Patroli dilakukan oleh pihak security dan pihak RPKH dan bersama oleh pihak PS dan FS dilaksanakan minimal sekali sebulan
2	Pemenuhan dan Perawatan Peralatan Perlindungan Hutan	Peralatan RPK	sesuai P32	FP, RPK	Peralatan telah terpenuhi sesuai peraturan perundangan guna perlindungan kebakaran lahan dan hutan
3	Sistem Deteksi Dini (Hot Spot)	Hot Spot Satelit TERRA, AQUA, NOAA, dsb	Harian	FP, RPK	Sistem deteksi dini melalui papan FDI, Patroli darat dan via drone, Monitoring Hotspot dan CCTV
4	Perekonomian masyarakat	Pemberian bantuan CD	-	CD-CSR	teralisasi sebanyak 6 unit kegiatan
5	Sosialisasi	Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar	1 x/pertahun	FS	Sosialisasi FPIC dilaksanakan pada bulan Januari –Maret 2023
6	Fire drill	Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar	1 x/pertahun	FP, RPK, dan FS	Dilakukan pada bulan Februari 2023

No.	Kegiatan Pengelolaan	Sasaran	Volume Kegiatan	PIC	Realisasi
7	Penanganan Limbah B3	Karyawan & kontraktor	setiap bulan	GA, HSE	Limbah B3 ditangani sesuai jenisnya, Direkap 1 x sebulan
8	Training Pengelolaan Limbah B3	Karyawan & kontraktor		HSE, FS	Dilakukan 1x Sebulan pada saat penilaian Evaluasi Kontraktor

4.3. Aspek Sosial

4.3.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT. BKM per bulan Februari 2022 tercatat sebanyak 33 orang sebagai tenaga kerja baik lokal dan non lokal. Selain itu, PT. BKM melakukan penyerapan tenaga kerja melalui mitra kerja atau kontraktor dalam mendukung kegiatan operasional lapangan.

Tabel 20. Tabel Tenaga Kerja PT. Balai Kayang Mandiri

Tenagakerja	Jumlah (orang)
• Jumlah total	33
• Perincian	
1. Laki-laki	32
2. Perempuan	1
• Asal tenagakerja	
1. Riau	15
2. Luar Riau	18

4.3.2 Pembangunan Sosial Masyarakat

Laporan realisasi pemberdayaan masyarakat serta community development (CD) PT. BKM tahun 2023, bahwa Desa binaan meliputi : 3 (tiga) desa yaitu Tasik Betung, Sei Mandau, Tuah Indrapura. Program pembinaan masyarakat desa hutan masih difokuskan pada jenis kegiatan sosial budaya, peningkatan SDM, pertanian, pendidikan, keagamaan, dan sarana prasarana desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21. Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Tahun 2022	Realisasi		Keterangan
			Januari s.d Desember 2022		
			Fisik	%	
1	2	3	5	7	8
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :				
	- Bantuan Pendidikan dan Penyuluhan	1 Kali	kali	40	Tasik Betung
	Jumlah				
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat				
	- Wirasaha dan Pemamfaatan HHBK	1 Unit	Unit	14	Bunga Raya, Sungai Mandau
	Jumlah				
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :				
	1 Pembinaan Sosial Budaya				
	- Sosial Kemasyarakatan	2 Kali	Kali	143	Tasik Betung
	- Kepemudaan, Olah Raga	2 Kali	Kali	100	
	- Pelayanan Kesehatan	2 Kali	2 Kali		Tasik Betung
	2 Kegiatan Keagamaan				
	- Hari Raya Agama / Santunan anak yatim	2 Kali	Unit	175	Tasik Betung, Sungai Mandau
	- Perlengkapan Ibadah	2 Unit	Unit	50	Sungai Mandau
	3 Infrastruktur				
	- Perbaikan/Service Jalan	2 Unit	Unit	17	Sungai Mandau
	- Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat	2 Unit	Unit	47	Tasik Betung
	Jumlah				
	Total				52,18

4.3.3 Pemanfaatan HHNK masyarakat sekitar hutan

Berdasarkan hasil identifikasi, potensi sumberdaya hutan yang ada di dalam konsesi perusahaan antara lain : ikan, rotan dan tumbuhan obat. Supaya pemanfaatan HHNK ini berjalan dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar konsesi, maka perlu adanya pembinaan khusus terhadap pemanfaatan HHNK. Perusahaan diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat melalui program-program kesejahteraan untuk masyarakat sekitar kawasan konsesi.

Tabel 22. Jenis Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu (HHNK) di PT. BKM

Tahun	Hasil pemanfaatan		
	Ikan	Madu	Damar
2022	5.435 Kg	0 Kg	950 Kg
2023	1900 Kg	235 Kg	900 Kg

Sumber: Data dari lapangan

4.3.4 Pembangunan Tanaman Kehidupan

Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (food security) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.

BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2024

5.1. ASPEK PRODUKSI

Sebelum melakukan Operasional PT. BKM telah melaksanakan kegiatan pembukaan wilayah hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jaringan kanal dan jalan serta pada saat ini dilakukan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan antara lain tata kelola gambut dengan pengukuran muka air tanah pada penataan ekosistem gambut untuk mengetahui kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dan fungsi lindung. Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Rencana Kegiatan Infrastruktur Tahun 2024

Kegiatan	Spesifikasi	Rencana
Service Kanal	Primer	12,0 Km
	Sekunder	10,0 Km
Service Jalan	Jalan utama	10 Km
	Jalan Cabang	0 Km
Pembangunan Water – Gate		1 Unit

Sumber: Data dari lapangan

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. BKM memiliki periode waktu 12 bulan yang dimulai dari bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2024.

Tabel 26. Rencana Pengelolaan aspek produksi tahun 2024

No	Parameter	Rencana	Keterangan
1	Tanam (Ha)	953.2	
2	Tebang (Ha)	953.2	
3	Produksi (M3)	103.048,84	
4	Survey Permanen Sample Plot (PSP)		
	a. Jumlah Plot	10	
	b. Luas (Ha)	181,6	

5.2. ASPEK EKOLOGI

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. BKM dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Seiring perkembangan waktu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan rencana operasional pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahunan. Berikut tabel rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2024:

Tabel 27. RO Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT BKM tahun 2024

No.	Kegiatan Pengelolaan	Sasaran	Volume Kegiatan	Tahun 2024												PIC	Keterangan
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
A	Kawasan Lindung dan HCVF																
1	Perawatan Papan Informasi/ Himbauan/ Larangan	Buffer Zone SM GSK	4 pcs													FP, PS, dan FS	Perawatan dilakukan 2x dalam setahun, kecuali terdapat perubahan tata ruang
		Riparian Zone Sungai Air Hitam															
		DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)															
2	Pemasangan Papan Informasi/Himbauan/Larangan	Kawasan Lindung Fungs Buffer Zone (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1) Pada Blok Minas I dan Blok Minas II	6 pcs												FP, PS, dan FS	Pemasangan papan informasi akan dilakukan sebanyak duakali, pada kawasan lindung di areal Blok Minas I, Minas III dan Blok Tasik Besar Serkap	
		Kawasan Lindung Fungs Buffer Zone, DPSL dan KPPN (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1) Pada Blok Minas I dan Tasik Besar Serkap															
3	Identifikasi kawasan lindung yang terdegradasi	Buffer Zone SM GSK, DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)	1 x/pertahun												PS,H SE, FSC	Mengidentifikasi lokasi kawasan lindung yang rusak dengan bantuan citra satelit, updating database peta, dan ground check ke lapangan	
4	Perawatan Pal Batas Kawasan Lindung Fungsi Buffer Zone	Buffer Zone SM GSK	6 KM												FSC, PS, FS	Bedasarkan Analisa Peta dan laporan pemasangan pal batas kawasan lindung fungsi Buffer Zone	
5	Pemasangan Batas Kawasan Lindung Fungsi Sempadan Sungai	Sempadan Sungai	8.7 km												FSC, PS, FS		
6	Rehabilitasi kawasan lindung	Seluruh konsesi	2 ha												FSC, PS, FS	Berdasarkan Penafsiran citra satelit dan identifikasi lapangan	

3	Penggunaan pupuk, herbisida & pestisida sesuai prosedur	Blok RKT 2020	Harian																Plantation	Aplikasi herbisida / pestisida sesuai hasil riset
4	Penanaman sesuai jadwal yang ditentukan	Blok RKT 2020	Harian																Plantation	Mempengaruhi masa guna tanah
5	Persiapan lahan tanpa bakar	Blok RKT 2020	Harian																Harvesting	Mempengaruhi masa guna tanah
C. Areal Tidak Efektif Untuk Produksi																				
1	Patroli Perlindungan Hutan	Seluruh konsesi	setiap bulan																Security, FP, PS, FS	Patroli dilakukan secara rutin, direkap 1 x sebulan
2	Pemenuhan dan Perawatan Peralatan Perlindungan Hutan	Peralatan RPK	sesuai P32																FP, RPK	Pemenuhan Peralatan RPK sesuai dengan P.32
3	Sistem Deteksi Dini (Hot Spot)	Hot Spot Satelit TERRA, AQUA, NOAA, dsb	Harian																FP, RPK	Sistem deteksi dini melalui papan FDI, Patroli, Monitoring Hotspot
4	Perekonomian masyarakat	Pemberian bantuan CD	-																CD-CSR	Bantuan Langsung
5	Sosialisasi/Fire drill	Karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar	1 x/pertahun																FS	Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan
7	Penanganan Limbah B3	Karyawan & kontraktor	setiap bulan																GA, HSE	Limbah B3 ditangani sesuai jenisnya, Direkap 1 x sebulan
8	Training Pengelolaan Limbah B3	Karyawan & kontraktor																	HSE, FS	Dilakukan 1x Sebulan pada saat penilaian Evaluasi Kontraktor

No.	Kegiatan Pemantauan	Sasaran	Volume Kegiatan	Tahun 2022												PIC	Keterangan
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
A Kawasan Lindung dan HCV																	
1	Pemantauan identifikasi flora dan fauna (Survey Biodiversity)	Buffer Zone SM Giam Siak Kecil	1 Jalur													FSC, PS	
2	Monitoring PSP HCS	Buffer Zone SM Giam Siak Kecil	1 x													FSC, PS	Pemantauan dilakukan 1 x setahun
3	Monitoring Satwa Insidental	Seluruh konsesi	Temporary													Pengawasan lapangan, FSC, EO	Pencatatan jenis satwa liar dan vegetasi dilindungi, Direkap 1 x sebulan
4	Patroli Pengamanan Hutan	DPSL (NKT 1.1, 1.2, 1.3, 2.3, 3, 4.1)	Temporary													Security, FP, PS, EO	Patroli dilakukan secara rutin bersama dengan PRKH dan FP
		Buffer Zone SM Giam Siak Kecil	12x														
B Areal Efektif Untuk Produksi																	
1	Pemantauan fisik dan kimia tanah	TPO (P. 003, P.050, P.147)	1 x,													WM, EO	Dilakukan 1x setahun di 3 Lokasi dan dilakukan pengujian fisik dan kimia tanah di laboratorium
2	Pemantauan Satwa Liar di Hutan Tanaman	TPO (3 Jalur Transek)	1 x													PS, EO	Pemantauan dilakukan 1 x setahun

3	Monitoring hama dan penyakit tanaman	Tanaman pokok	Harian														Plantation, EO	Direkap 1 x sebulan
4	Pengukuran Water Table (WT)	Areal TPO	Mingguan														WM, EO	Pengukuran dilakukan setiap minggu
5	Pengukuran Water Level (WL)	Areal TPO	Mingguan														WM, EO	Pengukuran dilakukan setiap minggu
6	Pemantauan subsiden	Areal TPO (P.m22, P.125, P.09, P.9210, P.103, P.24)	1 x														WM, EO	Pemantauan dilakukan 1 x setahun
7	Patroli Pengamanan Hutan	Blok RKT	12 x														Security, FP, PS, EO DAN FSC	Patroli dilakukan secara rutin
C. Areal Tidak Efektif Untuk Produksi																		
1	Pengambilan sample air permukaan	Efluen 1	2 x														WM, EO	
		Efluen 2	2 x														WM, EO	
2	Pengambilan sample air minum																	
3	Pengukuran Curah Hujan	Kantor distrik	Harian														FP, EO	Direkap 1 x sebulan
4	Pencatatan Kelembaban dan Temperatur Udara	Kantor distrik	Harian														FP, EO	Direkap 1 x sebulan
5	Pemantauan limbah B3	Gudang B3	12 x														GA, EO, FS	Direkap 1 x sebulan
6	Sanitasi lingkungan	Lingkungan Kantor dan Mess	12 x														GA, EO, FS	Melakukan pemantauan tingkat kebersihan, penanaman taman, pengelolaan sampah secara visual

5.3. ASPEK SOSIAL

5. Peningkatan ekonomi masyarakat

PT. BKM yang letak arealnya berada di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bahwa Desa binaan meliputi : 3 desa yaitu Tasik Betung, Desa Penyengat dan Tuah Indrapura. Dengan program CSR perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat disekitar konsesi HTI, melalui Program Pemberdayaan Masyarakat PT. BKM diarahkan pada lima aspek kegiatan yaitu :

1. Peningkatan SDM meliputi subsidi pendidikan, beasiswa, honor guru, ketrampilan, perlengkapan belajar mengajar.
2. Peningkatan perekonomian dengan pengembangan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan dan wiraswasta di desa-desa sekitar konsesi sesuai potensi desa.
3. Pembinaan sosial budaya meliputi pelayanan kesehatan, kegiatan sosial masyarakat, pemeliharaan lingkungan (penyiraman jalan lingkungan desa) dan peralatan olah raga.
4. Kegiatan keagamaan meliputi peralatan ibadah, ceramah agama/safari dakwah di desa-desa sekitar.
5. Pembangunan infrastruktur meliputi perbaikan jalan, partisipasi pembangunan gedung sekolah dan tempat ibadah.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendatangkan kontribusi positif dari masyarakat pedesaan terhadap kelangsungan pembangunan HTI untuk jangka waktu panjang secara keseluruhan. Dilain pihak, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat turut terangkat secara kuantitas dengan terjadinya perubahan pola pertanian dan usaha tani masyarakat yang lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung dari tingkat kesungguhan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap aspek kegiatan di lapangan.

Tabel 28. Rencana Pengelolaan Aspek Sosial tahun 2024

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Tahun 2024		Keterangan
		Fisik		
1	2	3		8
I	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :			
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	1	Unit	Tasik Betung
	Jumlah			
II	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat			
	- Peningkatan Ekonomi Masyarakat	2	Unit	Muara Bungkal, Tasik Betung
	Jumlah			
III	Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :			
	1 Pembinaan Sosial Budaya			
	- Sosial Kemasyarakatan	2	Unit	Tasik Betung
	- Kepemudaan, Olah Raga	2	Unit	Tuah Indrapura, Tasik Betung
	- Pelayanan Kesehatan	1	Kali	Tasik Betung
	2 Kegiatan Keagamaan			
	- Hari Raya Agama dan MTQ	2	Kali	Sungai Mandau, Bunga Raya
	- Perlengkapan Ibadah	2	Unit	Tasik Betung, Tuah Indrapura
	3 Infrastruktur			
	- Perbaikan/Service Jalan	1	Unit	Tasik Betung
	- Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat	1	Unit	Muara Bungkal
	Jumlah			

BAB VI. PENUTUP

Ringkasan publik Pengelolaan Hutan PT. BKM disusun dan didistribusikan ke distrik dan diunggah diwebsite APP <https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com>, agar dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. BKM menurut aspek Produksi, aspek Lingkungan, dan aspek Sosial.

Ringkasan publik Pengelolaan Hutan PT. Balai Kayang Mandiri disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. Balai Kayang Mandiri pada tahun 2023 dan rencana kegiatan tahun 2024. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. Balai Kayang Mandiri, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Lingkungan, dan Sosial secara seimbang.